

## KOMODIFIKASI GELAR HAJI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BAKALREJO GUNTUR DEMAK

**Devina Amanda Widyadhana**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
[devina\\_amanda\\_widyadhana\\_2001056001@walisongo.ac.id](mailto:devina_amanda_widyadhana_2001056001@walisongo.ac.id)

**Hasyim Hasanah**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
[hasyim.hasanah@walisongo.ac.id](mailto:hasyim.hasanah@walisongo.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis komodifikasi gelar haji dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di desa Bakalrejo Guntur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala desa, masyarakat, dan tokoh agama hasil observasi, dan dokumentasi. Studi ini menghasilkan temuan terkait bentuk komodifikasi gelar haji yaitu pertama, aspek spiritual dimana seseorang yang sudah haji akan mendapatkan penghormatan karena pencapaiannya dalam menjalankan ibadah haji. Kedua, aspek ekonomi dimana seseorang yang sudah haji dinilai mempunyai kemampuan lebih dalam segi material. Ketiga, aspek sosial dimana seseorang yang sudah haji dipandang memiliki akhlak yang baik dan taat beribadah. Hal tersebut dibuktikan dengan perkembangan kegiatan keislaman yang terus berkembang di masyarakat, sehingga masyarakat juga percaya kepada setiap calon yang sudah memiliki gelar haji di buktikan dengan terpilihnya kepala desa bergelar haji selama 3 periode berturut-turut.*

*Kata kunci: komodifikasi, haji, kepala desa*

### Abstract

*This research aims to describe and analyze the phenomenon of commodification of Hajj titles in the implementation of village head elections in Bakalrejo Guntur village. The type of research used in this research is qualitative research with a case study approach carried out through a process of interviews, observation and documentation. The results of this study found two findings, firstly the community's view regarding the Hajj degree in Bakalrejo village which is considered to have religious, economic and social skills. Second, the title of hajj is commodified to achieve the position of village head without losing the hajj image one has. This is proven by the development of Islamic activities that continue to grow in the community, so that the community also believes in every candidate who already has a Haj title, as proven by the election of a village head with a Haj title for 3 consecutive periods.*

*Keywords: commodification, pilgrimage, village head*



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, gelar “Haji” mulai dikenal pada masa kolonial Belanda di akhir abad ke-19. Pemerintah kolonial memperkenalkan gelar ini untuk mempermudah pengawasan terhadap tokoh-tokoh Muslim yang baru kembali dari ibadah haji, karena mereka khawatir akan potensi pemberontakan yang dipimpin oleh para kiai dan tokoh Islam.<sup>1</sup> Gelar haji tidak hanya digunakan di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Malaysia, Brunei, serta beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Dakwah dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dakwah berorientasi pada kebahagiaan yang salah satunya dapat dicapai melalui perilaku ekonomi. Dakwah dapat dipahami pada dua dimensi *pertama* dakwah sebagai ilmu artinya mempunyai kesatuan pengetahuan yang tersusun dengan saling berhubungan dan memiliki tujuan yang bersifat teoritis maupun praktis, *kedua* dakwah sebagai aktivitas artinya pergerakan transformasi dari Islam menjadi tatanan kehidupan pribadi.<sup>2</sup> Manusia akan berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang di anggap penting baginya meskipun harus mengeluarkan banyak uang. Sebagai bagian terpenting dari manusia, dakwah juga dapat dijadikan media atau alat untuk mendapatkan kekayaan. Dengan demikian, munculah istilah komodifikasi melalui simbol-simbol agama.<sup>3</sup>

Maraknya transaksi pasar pada komodifikasi agama salah satunya adalah komodifikasi agama yang di dapatkan melalui gelar haji. Ibadah haji adalah rukun Islam kelima yang banyak diperhatikan dan di utamakan oleh umat muslim dibandingkan dengan rukun sebelumnya karena Ibadah haji secara ekonomi lebih memerlukan banyak biaya sehingga ibadah ini wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan syarat apabila mampu.<sup>4</sup> Ibadah haji hukumnya wajib bagi umat Islam yang memiliki kemampuan secara material dan immaterial. Mampu secara material karena seseorang yang hendak menjalankan ibadah haji harus memiliki Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), sedangkan secara immaterial adalah jamaah yang mempunyai kondisi fisik dan mental dengan baik dan sehat.<sup>5</sup> Meskipun ongkos naik haji (ONH) mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi masalah tersebut tidak menjadikan umat Islam Indonesia mengurungkan niatnya untuk menjalankan ibadah haji. Hal ini dibuktikan dengan jumlah kuota calon jamaah haji di Indonesia yang terus bertambah. Bahkan, karena banyaknya seseorang yang mempunyai keinginan untuk

---

<sup>1</sup> M.Shaleh Putuhena, *Historiografi haji indonesia* (Yogyakarta:LkiS,2007) hlm.67.

<sup>2</sup> Hasyim Hasanah, “Arah Pengembangan Dakwah Melalui Sistem Komunikasi Islam,” *AT-TABSIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2016): 131–56.

<sup>3</sup> Umma Farida, “Komodifikasi Agama: Sebuah Kajian Tafsir Fenomenologis,” *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* 10 no 2 (2016): 17.

<sup>4</sup> Naili Arini Izzati Rohmah dan Medhy Aginta Hidayat, “Dinamika Modal Sosial dan Peran ‘Ebhū Ajjhi’ (Ibu Haji) dalam Masyarakat Pedesaan di Bangkalan dan Sampang,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2023): 160–72, <https://doi.org/10.23887/jiis.v9i2.69604>.

<sup>5</sup> Abdul Sattar dan Hasyim Hasanah, “Tingkat Pengetahuan Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional: Catatan Angkatan Vi Dari Semarang,” *Multazam : Jurnal Manajemen Haji dan Umrah* 3, no. 1 (2023): 43, <https://doi.org/10.32332/multazam.v3i1.7096>.

menjalankan ibadah haji harus menunggu giliran keberangkatan.<sup>6</sup> Seseorang yang sudah melakukan ibadah haji dinilai mempunyai kemampuan secara ekonomi dan mempunyai perilaku yang baik karena sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan hartanya untuk mendekati diri kepada Allah dan memenuhi panggilan untuk menjalankan rukun Islam ke lima.<sup>7</sup> Manasik Haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan antara lain : Wukuf, Thawaf, Sai, dan amalan lainnya pada masa itu, demi memenuhi panggilan Allah SWT.<sup>8</sup>

Gelar "Haji" memiliki pengaruh sosial yang besar dalam masyarakat, khususnya di Indonesia. Aspek sosial yang berkaitan dengan gelar ini yaitu Status Sosial, Gelar "Haji" sering kali meningkatkan status sosial individu dalam komunitasnya. Mereka yang telah menunaikan ibadah haji biasanya dipandang lebih tinggi dan dihormati karena dianggap telah memenuhi salah satu rukun Islam yang penting. Tanpa disadari, gelar haji memberikan persoalan baru di masyarakat yang dapat memunculkan konstruksi sosial dengan memberikan perbedaan kepada masyarakat lain yang belum menjalankan ibadah haji. Dengan adanya penilaian tersebut akan mengakibatkan pola pengelompokan pada setiap individu di masyarakat. Pola pengelompokan inilah yang kemudian dapat menjadikan perbedaan status sosial yang dialami setiap individu yang berdampak pada beberapa aspek kehidupan, salah satunya adalah pada pemilihan tokoh atau Kepala Desa.<sup>9</sup>

Pilkades adalah kegiatan dalam memilih kepala desa yang secara langsung dipilih warga masyarakat setempat. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 terkait desa yang mengganti Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pada pasal 31 ayat 1 dan 2 maka pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh Kabupaten/Kota. Pilkades ini merupakan kesempatan bagi semua masyarakat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. Pilkades sangat membutuhkan partisipasi rakyat agar pelaksanaan pemilihan berjalan dengan sukses. Besar dan kecilnya partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas dari pemilihan itu sendiri.<sup>10</sup> Sehingga, gelar haji dapat dijadikan sebagai komodifikasi sumber modal sosial di masyarakat yang dapat memberikan jaringan dan sumber daya sosial yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat untuk menggunakan haknya dalam memilih calon yang sudah melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian, sumber daya sosial ini dapat digunakan individu

---

<sup>6</sup> Abdul Rasyad, "Haji ' Antara Kewajiban Agama Atau Sebagai Modal Sosial," *Jurnal Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi sosialnya*. Edisi x vi (2017): 1–18.

<sup>7</sup> Bela Fitri, "Gelar Haji Sebagai Stratifikasi Sosial Pada Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 6, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.30829/jisa.v6i1.12962>.

<sup>8</sup> Yyun Affandi, *Haji Bagi Generasi Milenial-Paradigma Tafsir Tematik (Semarang: Fatawa Publishing, 2021), Hal. 48*

<sup>9</sup> Rasyad, "Haji ' Antara Kewajiban Agama Atau Sebagai Modal Sosial."

<sup>10</sup> Agus Sofyan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 8 (2019): 1–14.

untuk mencapai tujuannya sebagai kepala desa.<sup>11</sup>

Desa Bakalrejo merupakan satu dari beberapa desa yang basis muslimnya kuat dengan afiliasi NU nya strong dan hebat sehingga dalam pemilihan kepala desa, desa bakalrejo menggunakan gelar haji sebagai salah satu komoditi utama dibandingkan desa-desa lainya seperti desa Turitempel, Bumiharjo, Trimulyo, dan beberapa desa yang ada di kecamatan guntur.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anisa Ifadah yang mengkaji terkait makna gelar haji bagi anggota DPRD Partai Nasionalis Kabupaten Tegal. Penelitian ini menganalisis makna gelar haji bagi anggota DPRD yang dapat dijadikan sebagai motivasi agar tetap mempertahankan ibadah mabrur haji dengan selalu bertanggungjawab dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam penelitian ini, terdapat tiga makna gelar haji yaitu sebagai identitas muslim, sebagai nasionalis, dan sebagai status sosial.<sup>12</sup>

Dengan demikian, maraknya komodifikasi haji yang sudah bersifat umum di masyarakat menjadikan penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Komodifikasi Gelar Haji Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa Bakalrejo Guntur Demak”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis komodifikasi gelar haji dalam pemilihan kepala Desa di Desa Bakalrejo Guntur.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 30 Mei 2024 di Desa Bakalrejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dimana dalam penelitian kualitatif peneliti berusaha untuk memahami fenomena sosial dengan menggambarkan secara keseluruhan melalui kata-kata dan memberikan informasi terkait fenomena yang diteliti dari sumber informan. Data diperoleh dari dokumen administrasi pemilihan kepala desa dari 3 periode mulai tahun 2007, 2015, dan 2023. Selain itu, data penelitian juga diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala desa periode saat ini, sesepuh desa, tokoh masyarakat, dan tokoh agama juga melalui kegiatan observasi dan dokumentasi di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, skripsi, artikel, dan berita yang ada di internet.<sup>13</sup> Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kreabilitas data melalui triangulasi sumber, triangulasi waktu, dan triangulasi teknik. Sedangkan teknik analisisnya menggunakan Teknik analisis Miles and Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan

---

<sup>11</sup> Mujibur Rahman, “Visualisasi Agama di Ruang Publik: Komodifikasi, Reproduksi Simbol dan Maknanya,” *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 4, no. 1 (2018): 91–106, <https://doi.org/10.36835/humanistika.v4i1.32>.

<sup>12</sup> Anisa Ifadah 2001056032, “Makna Gelar Haji Bagi Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Partai Nasionalis Kabupaten Tegal,” 2023.

<sup>13</sup> Muhammad Rijal Fadli, “Memahami desain metode penelitian kualitatif,” *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menggunakan observasi jenis partisipan di mana peneliti ikut serta secara langsung dalam kegiatan yang sedang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam tentang perilaku, interaksi, dan konteks sosial dari kelompok yang diteliti diarahkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena yang terjadi terkait komodifikasi gelar haji dengan menggunakan data kualitatif yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan sumber informan. Dengan demikian, melalui pendekatan ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam serta menambah pemahaman terkait fenomena yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini difokuskan pada komodifikasi gelar haji dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Komodifikasi berasal dari 3 bahasa Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), komodifikasi adalah perubahan fungsi suatu benda, jasa, atau entitas lain yang umumnya tidak dipandang sebagai suatu produk komersial menjadi komoditas. Dalam bahasa Arab, komodifikasi dikenal sebagai *تسليع* (*tasliya'*) Istilah ini mengacu pada proses transformasi barang, jasa, ide, atau individu menjadi komoditas atau objek perdagangan yang memiliki nilai ekonomi. Dalam bahasa Inggris, komodifikasi diterjemahkan sebagai *commodification* Istilah ini merujuk pada proses transformasi barang, jasa, ide, atau individu menjadi komoditas atau objek dagang yang memiliki nilai ekonomi. Sedangkan menurut istilah Komodifikasi merupakan proses di mana barang, jasa, ide, atau individu diubah menjadi komoditas atau objek perdagangan yang memiliki nilai ekonomi. Istilah ini berasal dari kata “komoditas,” yang berarti sesuatu yang dapat diperdagangkan atau ditukar, dan “modifikasi,” yang berarti perubahan. Dalam konteks ini, komodifikasi mengacu pada perubahan nilai guna suatu barang atau jasa menjadi nilai tukar.

Komodifikasi haji menurut Greg Fealy dalam artikelnya *Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia*, dalam Greg Fealy & Sally White (eds), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2008), menjelaskan bahwa komodifikasi ini berasal dari kata *commodity* yang artinya adalah benda komersial atau bisa disebut dengan objek perdagangan. Dapat disimpulkan bahwa komodifikasi haji ini terkait gelar haji yang dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>14</sup> Sebelum membahas lebih lanjut terkait bagaimana komodifikasi gelar haji terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Bakalrejo Guntur, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana pengaruh gelar haji dalam pandangan masyarakat sehingga gelar ini dapat dijadikan sebagai komodifikasi terhadap pemilihan calon kepala desa.

---

<sup>14</sup> Syaipul Hadi, “Komodifikasi Berita Penyelenggaraan Ibadah Haji di SKH Republika,” *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah* 14, no. 27 (2015): 51–55.

Pemilihan kepala desa diadakan pada bulan November 2023 lalu. Lama jabatan kepala desa adalah 8 tahun. Selama 3 periode ini, di desa Bakalrejo Guntur mempunyai kepala desa yang bergelar haji antara lain adalah H.M periode 2007, H.S periode 2015, dan H.A periode saat ini. Selain itu, Staff Kelurahan di desa Bakalrejo Guntur juga banyak yang sudah melaksanakan ibadah haji mulai dari sekertaris desa, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan rakyat, kaur perencanaan, dan kaur keuangan. Berdasarkan data observasi yang telah dilakukan, sebanyak 20% dari 5.522 jumlah penduduk di desa Bakalrejo Guntur sudah melaksanakan ibadah haji.

Menurut Bourdieu seseorang yang sudah menjalankan ibadah haji tentu mempunyai symbol yang ditandai dengan praktik gaya hidup secara obyektif maupun subjektif pada lingkungan kehidupannya.<sup>15</sup> Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa menurut pandangan penduduk desa Bakalrejo yang sudah melaksanakan ibadah haji, Haji adalah kewajiban dan ibadah yang dilakukan dengan mengharapkan Ridha Allah. Seseorang yang sudah berhaji seharusnya mempunyai perilaku yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam termasuk dalam hal memimpin. Sedangkan menurut masyarakat yang belum melaksanakan ibadah haji, seseorang yang sudah haji dinilai lebih mempunyai pengalaman dan unggul dalam aspek keagamaan serta aktif dalam kegiatan masyarakat.

Menurut Max Weber yang membahas terkait stratifikasi sosial berpendapat bahwa terdapat 3 dimensi terbentuknya nilai sosial diantaranya *power* atau kekuasaan, *privilege* atau hak keistimewaan, dan *prestise* atau kehormatan.<sup>16</sup> Sejalan dengan teori tersebut, Selain bernilai ibadah dan kewajiban dalam agama Islam, Haji menurut masyarakat Bakalrejo mempunyai nilai ganda yang terdiri dari 3 nilai yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Nilai Gelar Haji di Masyarakat**

No	Nilai Gelar Haji di Masyarakat	Keterangan
1.	Nilai religious	Nilai religious di dapatkan karena sudah berhasil dalam menyempurnakan agama dengan menjalankan rukun Islam kelima. Dengan demikian haji menjadi realita sosial yang di tradisikan sebagai peningkatan status sosial di masyarakat
2.	Nilai ekonomi	Gelar haji menandakan kelas ekonomi setiap individu. Dengan demikian, seseorang yang sudah menjalankan ibadah haji dipandang sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dalam segi ekonomi.
3.	Nilai sosial	Kelas sosial bagi penganut agama Islam umumnya dilihat dari keilmuan dan ketaatan seseorang dalam beribadah termasuk

<sup>15</sup> Zaini Miftach, "Eksistensi dan Pemaknaan Simbolik Haji Masyarakat di Desa Paroto Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng," *Pinisi Journal of Sociology Education Review* 2, no. 1 (2018): 53–54.

<sup>16</sup> Makna Gelar dkk., "Makna Gelar Haji Bagi Masyarakat Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang Kota Batam," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): 163–68.

		menjalankan ibadah haji. Dengan demikian, seseorang yang sudah menjalankan ibadah haji pasti akan mendapatkan penghargaan dan dijadikan sebagai tokoh atau panutan di masyarakat. <sup>17</sup>
--	--	---

### 1. Nilai Religious

Masyarakat desa Bakalrejo memandang bahwa seseorang yang sudah menjalankan ibadah haji akan mendapatkan *prestise* atau penghormatan karena pencapaiannya dalam menyempurnakan agama.

### 2. Nilai Ekonomi

Selain nilai religious, seseorang yang sudah menjalankan ibadah haji di desa Bakalrejo juga dipandang memiliki kemampuan dalam segi ekonomi dan materi. Karena haji adalah rukun Islam yang wajib dilakukan untuk seseorang yang mempunyai kemampuan. Sehingga kemampuan menurut pandangan masyarakat Bakalrejo adalah mampu secara ekonomi.

### 3. Nilai Sosial

Masyarakat desa Bakalrejo dikenal sebagai desa yang sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam. Sehingga hal ini akan membentuk dominasi serta membentuk tradisi dan realitas sosial. Umumnya, stratifikasi sosial dinilai dari keilmuan dan ketaatan dalam menjalankan perintah agama. Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat desa Bakalrejo yang bergelar haji dianggap sebagai seseorang yang taat agama, baik akhlaknya, dan teguh dalam beribadah. Selain itu, haji juga berarti metode untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang terhadap Tuhan. Dengan demikian, menurut pandangan masyarakat desa Bakalrejo, gelar haji sangat berpengaruh terhadap pencalonan kepala desa karena seseorang yang sudah mempunyai gelar haji mempunyai kecakapan nilai seperti yang telah dijelaskan diatas.

Pandangan masyarakat terkait haji mempunyai nilai yang dapat dibanggakan sehingga seseorang akan berusaha untuk mendapatkan nilai tersebut. Ketika seseorang sudah berhasil dalam mencapai nilai itu maka selanjutnya mereka akan berfikir bagaimana *status symbols* itu dapat selalu di tingkatkan. Dengan demikian, seseorang akan mendapatkan posisi dan pengakuan dalam kehidupan sosialnya yang terikat erat dengan penerimaan dan penghargaan dari masyarakat. Sebagaimana diakui oleh Robert Dahl salah satu ilmuan politik yang berpendapat bahwa bukan sesuatu yang aneh jika ketika masa pilkades, pilkada, pileg, maupun pilpres datang

---

<sup>17</sup> Gelar dkk.

akan banyak elite politik yang menjalankan ibadah haji dengan harapan hajinya mampu menaikkan elektabilitasnya.<sup>18</sup>

Haji dapat di komodifikasi dari keperluan hidup masyarakat Islam secara umum menjadi komoditas industri pada kelas tertentu. Pada masyarakat desa Bakalrejo Guntur, haji dapat dijadikan komoditas dalam hal pencalonan kepala desa. Sehingga, haji dalam hal ritual keagamaan ini dijadikan sebagai alat kampanye untuk mendapatkan hak suara dari masyarakat. Namun, faktanya meskipun gelar haji menjadi komodifikasi dalam pencalonan kepala desa di Bakalrejo Guntur, kepala desa yang sudah memiliki gelar haji menyadari jika gelarnya harus memberikan manfaat dan menciptakan kerukunan pada masyarakat, selain itu kepala desa juga menyadari bahwa Amanah yang diberikan harus dijalankan dengan baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Sehingga kepala desa yang memiliki gelar haji di Bakalrejo ini memenangkan hak suara masyarakat sebanyak 3 kali periode karena dinilai berhasil dalam mengambil suara masyarakat dengan kemampuan mengimplementasikan gelar haji pada jabatannya sebagai kepala desa. Berikut adalah tabel kemenangan kepala desa bergelar haji selama 3 periode:

**Tabel 2. Perolehan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Periode 2007, 2015, dan 2023 di Desa Bakalrejo Guntur**

**PERIODE 2007**

<b>CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
H.S	3.589 (65%)
MA	1.932 (35%)

**PERIODE 2015**

<b>CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
H.M	3.865 (70%)
NS	1.656 (30%)

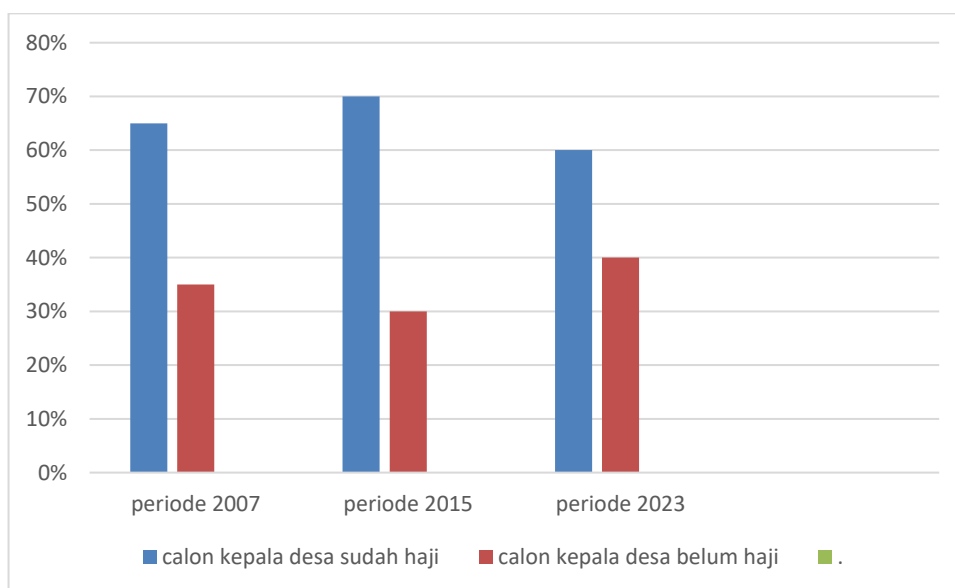
**PERIODE 2023**

<b>CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
H.A	3.313 (60%)
DY	2.208 (40%)

<sup>18</sup> Istianah Istianah, "Hakikat Haji Menurut Para Sufi," *Esoterik* 2, no. 1 (2017): 30–44, <https://doi.org/10.21043/esoterik.v2i1.1900>.



Dapat dilihat pada tabel diagram berikut :



Dari tabel diatas terlihat bahwa perolehan suara pada periode 2007 kepada calon kepala desa yang sudah haji mencapai 65% sedangkan calon kepala desa yang belum haji memperoleh suara 35%. Pada periode selanjutnya di tahun 2015, calon kepala desa yang sudah haji memperoleh suara sebanyak 70% sedangkan calon kepala desa yang belum haji mendapatkan suara 30%. Hal serupa terjadi pada periode 2023, calon kepala desa yang sudah haji memperoleh suara sebanyak 60% sedangkan calon kepala desa yang belum haji memperoleh suara 40%.

Sebagaimana dijelaskan oleh Mosco bahwa komodifikasi adalah proses transformasi dari nilai guna menjadi nilai tukar.<sup>19</sup> Maka gelar haji terhadap pemilihan calon kepala desa ini merupakan transformasi dari nilai guna religious menjadi nilai tukar yang dapat menjadikan keuntungan finansial. Nilai keagamaan ini dikomodifikasi menjadi peluang jabatan dalam meraih posisi sebagai kepala desa, namun juga membawa dampak baik bagi masyarakat desa. Agar dapat lebih mudah di pahami, berikut adalah tabel komodifikasi gelar haji dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di desa Bakalrejo Guntur:

<sup>19</sup> Latif Fianto dan Fathul Qorib, “Komodifikasi Agama dan Kepentingan Ekonomi Politik Media dalam Sinetron Para Pencari Tuhan,” *Jurnal Komunikasi Nusantara* 4, no. 1 (2022): 140–48, <https://doi.org/10.33366/jkn.v4i1.148>.

**Tabel 3. Komodifikasi Gelar Haji dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa Bakalrejo Guntur**

NILAI GUNA	NILAI TUKAR	PERKEMBANGAN DAN KEUNTUNGAN DESA
Kemampuan dalam bidang agama, ekonomi, dan sosial	Mendapatkan posisi dan kedudukan yang di inginkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkembangnya organisasi Islam karangtaruna, IPNU, IPPNU, dan GP Ansor.</li> <li>2. Terjadinya hubungan baik antara tokoh agama, Organisasi Islam, Kepala desa serta jajaran.</li> <li>3. Membuat kegiatan rutinan yang terdiri dari istighosah, tahlil keliling, dan khataman Al-Qur'an sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah serta membangun keakraban dan kedekatan antara masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat</li> <li>4. Gotong royong dalam membangun desa</li> </ol>

Perkembangan nilai religiusitas tidak bisa terbentuk jika kepala desa tidak mendukung setiap kegiatan yang ada. Terjadinya perkembangan nilai religiusitas yang terjadi di desa Bakalrejo Guntur adalah karena hubungan baik dan saling support yang dilakukan semua pihak mulai dari kepala desa, organisasi Islam, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk mendorong masyarakat agar mempunyai ketertarikan dalam mengikuti kegiatan keislaman. Sehingga desa Bakalrejo Guntur mampu menciptakan rasa kasih sayang, empati, serta kerukunan pada masyarakat.

Melihat hasil perkembangan yang terlihat pada setiap periode menjadikan masyarakat desa Bakalrejo Guntur semakin yakin jika gelar haji yang dimiliki oleh setiap kepala desa tidak hanya bersifat formalitas untuk menaikkan suara dan elektabilitasnya saja, melainkan gelar haji yang nilai keagamaannya dapat di implementasikan di masyarakat. Sehingga, mayoritas hasil pemilihan hak suara pada 3 periode berturut turut dimenangkan oleh calon kepala desa yang sudah menjalankan ibadah haji. Dengan demikian, inilah alasan haji dapat dijadikan sebagai faktor penentu dalam pemilihan calon kepala desa di desa Bakalrejo Guntur sehingga calon kepala desa yang mempunyai gelar haji berpeluang besar dalam menempati posisi sebagai kepala desa.

Dengan demikian, komodifikasi gelar haji salah satunya adalah nilai spiritual. Artinya, seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji dinilai sebagai seseorang yang memiliki ketaatan atas Tuhan, ketaatan beribadah dan bertanggungjawab dalam menjalankan amanahnya sehingga dapat menciptakan perkembangan yang positif. Hal ini dikuatkan dengan hasil riset yang dikemukakan Muhammad Khairul Anuar (2023), Dina Rosa (2021), dan Anisa Ifadah (2023) yang menunjukkan bahwa nilai spiritualitas pada masyarakat terkait gelar haji memiliki nilai tambah dalam membingkai persepsi positif pada pemilihan kepala desa di Bakalrejo Guntur.

## KESIMPULAN

Berdasarkan observasi yang dilakukan dilapangan, Adanya fenomena komodifikasi gelar haji dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Bakalrejo Guntur dipicu karena pandangan masyarakat yang menilai bahwa seseorang yang sudah melakukan ibadah haji mempunyai nilai religious, ekonomi, dan sosial. Sehingga, pandangan tersebut dimanfaatkan oleh seseorang yang sudah memiliki gelar haji untuk mendapatkan kedudukan sebagai kepala desa. Namun, tak hanya sebagai formalitas saja, gelar haji yang dijual tentunya menghasilkan perkembangan baik di desa terlebih dalam kegiatan keislaman. Sehingga, masyarakat percaya bahwa gelar haji yang dimiliki kepala desa adalah gelar mulia yang berhak untuk mendapatkan penghormatan dan diberikan kedudukan tinggi, hal ini dibuktikan dengan terpilihnya kepala desa bergelar haji selama tiga periode berturut-turut mulai dari periode tahun 2007, 2015, dan 2023.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada berbagai pihak, terutama kepada kedua orangtua dan keluarga yang selalu memberikan semangat dan dukungan. serta pihak terkait yang sudah membantu dalam proses penelitian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan, terlebih kepada kepala desa Bakalrejo saat ini bapak Agus, tokoh agama bapak Nasroh, tokoh masyarakat pak Nurhadi, serta sesepuh di desa Mbah Hariyanto. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Devani Adinda Widyadhari, Dini Kurnia Putri dan Lukman Hakim yang telah menemani setiap proses penelitian dan memberikan dukungan hingga penulis berhasil menyelesaikan hasil penelitiannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Yuyun. (2021) *Haji Bagi Generasi Milenial-Paradigma Tafsir Tematik*. Semarang: Fatawa Publishing
- Anisa Ifadah 2001056032. "Makna Gelar Haji Bagi Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Partai Nasionalis Kabupaten Tegal," 2023.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami desain metode penelitian kualitatif." *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Farida, Umma. "Komodifikasi Agama: Sebuah Kajian Tafsir Fenomenologis." *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir* 10 no 2 (2016): 17.
- Fianto, Latif, dan Fathul Qorib. "Komodifikasi Agama dan Kepentingan Ekonomi Politik Media dalam Sinetron Para Pencari Tuhan." *Jurnal Komunikasi Nusantara* 4, no. 1 (2022): 140–48. <https://doi.org/10.33366/jkn.v4i1.148>.
- Fitri, Bela. "Gelar Haji Sebagai Stratifikasi Sosial Pada Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)* 6, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.30829/jisa.v6i1.12962>.
- Gelar, Makna, Haji Bagi, Masyarakat Kelurahan, Kasu Kecamatan, Belakang Padang, Kota Batam, Muhammad Khairul Anuar, dkk. "Makna Gelar Haji Bagi Masyarakat Kelurahan

- Kasu Kecamatan Belakang Padang Kota Batam.” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): 163–68.
- Hadi, Syaipul. “Komodifikasi Berita Penyelenggaraan Ibadah Haji di SKH Republika.” *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah* 14, no. 27 (2015): 51–55.
- Hasanah, Hasyim. “Arah Pengembangan Dakwah Melalui Sistem Komunikasi Islam.” *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2016): 131–56.
- Istianah, Istianah. “Hakikat Haji Menurut Para Sufi.” *Esoterik* 2, no. 1 (2017): 30–44. <https://doi.org/10.21043/esoterik.v2i1.1900>.
- Mujibur Rahman. “Visualisasi Agama di Ruang Publik: Komodifikasi, Reproduksi Simbol dan Maknanya.” *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* 4, no. 1 (2018): 91–106. <https://doi.org/10.36835/humanistika.v4i1.32>.
- Rasyad, Abdul. “‘Haji ’ Antara Kewajiban Agama Atau Sebagai Modal Sosial.” *Jurnal Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi sosialnya*. Edisi x vi (2017): 1–18.
- Rohmah, Nailly Arini Izzati, dan Medhy Aginta Hidayat. “Dinamika Modal Sosial dan Peran ‘Ebhu Ajjhi’ (Ibu Haji) dalam Masyarakat Pedesaan di Bangkalan dan Sampang.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 9, no. 2 (2023): 160–72. <https://doi.org/10.23887/jiis.v9i2.69604>.
- Sattar, Abdul, dan Hasyim Hasanah. “Tingkat Pengetahuan Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional: Catatan Angkatan Vi Dari Semarang.” *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah* 3, no. 1 (2023): 43. <https://doi.org/10.32332/multazam.v3i1.7096>.
- Sofyan, Agus. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 8 (2019): 1–14.
- Zaini Miftach. “Eksistensi dan Pemaknaan Simbolik Haji Masyarakat di Desa Paroto Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.” *Pinisi Journal of Sociology Education Review* 2, no. 1 (2018): 53–54.